



BUPATI TEMANGGUNG

PENGANTAR

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEMANGGUNG**

**KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MENGENAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025**

SAMBUTAN BUPATI...

- 1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
- 2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
 - a. Bidang Tenaga Kerja (DINPERINAKER)**
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAPPKB)**
 - c. Bidang Pangan (DKPPP)**
 - d. Bidang Pertanahan (DPRKPLH)**
 - e. Bidang Lingkungan Hidup (DPRKPLH)**
 - f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL)**
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES)**
 - h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)**
 - i. Bidang Perhubungan (DINHUB)**

j. Bidang Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO)

k. Bidang Koperasi dan UKM (DINKOPDAG)

l. Bidang Penanaman Modal (DPMPTSP)

Urusan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Temanggung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan promosi potensi investasi daerah.

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp2,150 triliun. realisasi investasi yang dicapai sebesar Rp2,159 triliun atau melampaui target. Pencapaian tersebut berkat kerja keras seluruh perangkat daerah, sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat,...

Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan lima program utama di bidang penanaman modal, yang secara keseluruhan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100 persen atau berkategori sangat memuaskan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Temanggung sebagai daerah tujuan investasi yang aman, nyaman, dan menjanjikan.

Temanggung, 10 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19681210 199001 1 001

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/ dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	REALISASI ((disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/ dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
				Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	90 %	100% Target Investasi Rp. 2.152 M Realisasi Investasi Rp. 2.159 M	1. Kondisi KPI yang masih tersedia berada di dalam dan belum ada akses masuk; 2. Realisasi investasi didominasi oleh sektor UMKM, sehingga semakin lama potensi realisasi investasi mikro kecil semakin habis; 3. Prediksi penurunan minat investasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.	Melaksanakan Jemput Bola Perizinan dan Membentuk Tim percepatan Investasi	
				2. Program Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					
				Indikator program Persentase Pelaksanaan promosi penanaman modal	90%	100%	Belum adanya peta potensi investasi sebagai bahan promosi	Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun peta potensi sebagai bahan promosi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	REALISASI ((disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub kegiatan	1 sub kegiatan	Belum adanya peta potensi investasi sebagai bahan promosi	Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun peta potensi sebagai bahan promosi	
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen (Central Java Investment Business Forum (CJIBF), Forum Investasi Temanggung (FIT) dan Media sosial, Temanggung Fest 2025)	Belum adanya peta potensi investasi sebagai bahan promosi	Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun peta potensi sebagai bahan promosi	
				3. Program Pelayanan Penanaman Modal					
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	90 %	100 %	Masih adanya pemohon yang belum memahami tata cara permohonan baik secara online maupun hadir fisik di MPP sehingga menggunakan jasa orang lain	Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman tata cara prosedur permohonan layanan kepada masyarakat	
				Persentase pengelolaan data dan Sistem Informasi	90 %	100 %	Saat ini belum terdapat data secara satu pintu karena ada yang masih manual dan ada yang sudah menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Investasi melalui OSS	Menggunakan kertas kerja sebagai alat bantu untuk merekap data dari perizinan yang masih dilaksanakan secara manual	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/ dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	REALISASI ((disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/ dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	Masih adanya pemohon yang belum memahami tata cara permohonan baik secara online maupun hadir fisik di MPP	Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman tata cara prosedur permohonan layanan kepada masyarakat	
				1) Sub Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.000 Pelaku Usaha	13.586 Pelaku Usaha	Masih adanya pemohon yang belum memahami tata cara permohonan baik secara online maupun hadir fisik di MPP	Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman tata cara prosedur permohonan layanan kepada masyarakat	
				2) Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	100 Pelaku Usaha	193 Pelaku Usaha	Masih ada pemohon yang belum memahami tata cara dan persyaratan perizinan sehingga sering mengalami hambatan dalam proses pengajuannya	Memberikan pendampingan terhadap pemohon	
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				Persetase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	90%	100%	Belum semua perusahaan melakukan pelaporan kegiatan usahanya	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	REALISASI ((disertai dengan volume dan satuan berupa unit/kegiatan/dokumen/dsb sesuai dengan indikatornya)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	Belum semua perusahaan melakukan pelaporan kegiatan usahanya	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha	
				1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	Aplikasi system OSS RBA sering <i>Doen</i> pada saat bimbingan teknis, sehingga tidak bias langsung diimplementasikan	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait aplikasi OSS RBA	
				2) Pengawasan Penanaman Modal	15 Pelaku Usaha	49 Pelaku Usaha	Belum semua perusahaan melakukan pelaporan kegiatan usahanya	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha	

Temanggung, 10 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681210 199001 1 001

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG
MENGENAI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

NO	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	KINERJA MAKRO EKONOMI					
	A. Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial					
	Dilaporkan dalam dokumen LKPJ bahwa, tahun 2024 ditetapkan sebagai tahun Peningkatan Kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan tata Kelola pemerintahan dengan tema: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasilnya sebagai berikut: Ekonomi Kabupaten Temanggung yang tahun 2024, sudah sepenuhnya pulih normal kembali sejak pasca pandemi covid 19. Berdasarkan data capaian tahun 2024 bahwa, ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2024 tumbuh positif 5,04%, hanya meningkat sedikit dibanding dengan capaian tahun 2023 yang tumbuh 5,20%. sayangnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 naik 0,03% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2024 sebesar 2,35 % dan 2,32% di tahun 2023 sedangkan Angka Kemiskinan Uluran sebesar 0,59% dari tahun 2023, persentase penduduk miskin menjadi 8,67% di tahun 2024 dan 9,26% di tahun 2023.	Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi RPJPD baru periode 2025 – 2045 tahun start Indonesia emas yang maju berdaulat dan berkelanjutan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistik untuk Transformasi (perubahan) Sosial, Ekonomi dan tata Kelola pemerintahan, ketiga perubahan mendasar akan tercermin dan kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjadi solusi konkrit dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Sesuai arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2045, untuk : a. Agenda/ Kebijakan Pembangunan Ekonomi				
		1) Menarik investor ke daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan	1. Reviu Stantar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Membentuk TIM Percepatan Investasi dan TIM Pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Telah menyusun Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2025, dan reviu SOP akan dilaksanakan Tahun 2026. 2. Membuat SK TIM Koordinasi Percepatan Investasi Kabupaten Temanggung yg ditandatangani oleh SEKDA Kab. Temanggung	1. Telah menyusun standar pelayanan tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pelayanan perizinan dan non perizinan, 2. Melaksanakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antar instansi guna meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, 3. Menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan untuk sektor usaha yang mengalami kendala perizinan dalam rangka investasi.	DPMTSP

Temanggung, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka. Bid		
Kasub/Kasub-bag		